

ABSTRAK

TES / *Shelter* berfungsi sebagai tempat / lokasi evakuasi sementara sesaat sebelum terjadinya tsunami. Bangunan ini diperlukan pada skala lingkungan agar masyarakat segera mencapai ketinggian yang aman sehingga terhindar dari terjangan arus tsunami. Bangunan ini dapat pula menjadi multi-fungsi tanpa kehilangan fungsi utamanya. Di kota Padang, pada April 2015 telah diresmikan 2 bangunan shelter yang berlokasi di kelurahan Parupuk Tabing dan di Kelurahan Tabing Padang dengan menghabiskan dana sebesar 39 Milyar Rupiah dari APDN 2014. Akan tetapi semenjak peresmian, bangunan TES / *Shelter* tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuat suatu model pengelolaan Tempat Evakuasi Sementara / *Temporary Evacuation Shelter* (TES) agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal memiliki daya guna yang lebih efektif dan efisien. Metode identifikasi sumber penyebab berdasarkan studi literatur dan wawancara, kemudian data diperoleh berupa (1) wawancara dengan Pemerintah dan masyarakat, (2) pengamatan langsung tentang kondisi *shelter* saat ini. Hasil penelitian adalah berupa keadaan yang terjadi pada *shelter* saat ini, dan nantinya akan menjadi patokan perancangan model pengelolaan *shelter*, antara lain (1) Sejarah & Profil *shelter* Nurul Haq Padang, (2) Sejarah & Profil, (3) Desain Bangunan dan Peralatan *shelter* Nurul Haq Padang, (4) Manfaat *shelter* Nurul Haq Padang bagi masyarakat, (5) Status Pengelolaan *shelter* Nurul Haq Padang, (6) Pemeliharaan *Shelter* Nurul Haq Padang, (7) Sistem Pengamanan *shelter* Nurul Haq Padang, (8) Pemanfaatan *shelter* Nurul Haq Padang (9) Efek dari Ketidak Jelasan Status *Shelter* Nurul Haq Padang (10) Harapan Masyarakat Untuk *Shelter* Nurul Haq Padang, (11) Penjelasan dari Pemerintah Mengenai *Shelter* Nurul Haq Padang, (12) Model Pengelolaan *Shelter* Nurul Haq berbasis masyarakat. *Shelter* Nurul Haq saat ini dibawah kepemilikan Pemerintah pusat dan apabila diserahkan nantinya, maka *shelter* Nurul Haq akan diberikan kepada Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Padanglah yang berhak menentukan sistem pengelolaan *shelter* seperti apa nantinya.

Kata kunci : *Shelter*, Pemerintah Kota Padang, masyarakat, Pemerintah Pusat, Pengelolaan *shelter*